



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Mojokerto
Full of Majapahit Greatness



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024**

DISUSUN OLEH:

VIKO CAHYA SETIAWAN S.KOM (KEPALA SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN)



(0321) 391268



diskominfo.mojokertokab.go.id



diskominfo@mojokertokab.go.id



Jl. A. Yani no. 16 Kota Mojokerto, Jawa Timur



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya pada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ini merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Diskominfo sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan subkegiatan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Diskominfo TA. 2024. Selain itu LKjIP ini juga memberikan gambaran kendala/permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Diskominfo Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya LKjIP akan digunakan sebagai referensi untuk peningkatan kinerja Diskominfo di tahun-tahun berikutnya.

Demikian untuk menjadikan maklum, saran dan masukan akan kami pergunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Diskominfo kedepan.

Mojokerto, 5 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Drs. NUGRAHA BUDHI SULISTYA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 198903 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Diskominfo dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**, dengan menjalankan Misi ke 3, yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan”**.

Tujuan dan Sasaran Diskominfo mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 19.133.884.991 (*Sembilan belas miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*) yang penggunaannya diperuntukkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam 4 (empat) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 dicapai kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut :

No .	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,75	4,16	110,93	19.133.884.991	18.416.966.177	96,25

Capaian sasaran Tahun 2024 sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks SPBE diperoleh capaian kinerja sebesar 110,93 % dan capaian realisasi anggaran sebesar 96,25 % atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBARvii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi2

 C. Maksud dan Tujuan3

 D. Dasar Hukum4

 E. Aspek – Aspek Strategis6

 F. Isu – Isu Strategis/ Permasalahan Utama7

 G. Sistematika.....7

 F. Isu – Isu Strategis/ Permasalahan Utama7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

 A. Rencana Strategis Tahun 2021-20269

 B. Perjanjian Kinerja tahun 2024.....16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA18

 A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran.....18

 1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024.....19

 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 202421

 3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra28

 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional dan Daerah Lain29

 B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome).....31

 1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan34

 2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 202436

 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya37

 C. Prestasi/Penghargaan37

BAB IV PENUTUP38

 A. Kesimpulan.....38

 B. Langkah Perbaikan38

LAMPIRAN42

 1. Matrik Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan Diskominfo Tahun 202442

 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 Diskominfo Kabupaten Mojokerto.....44

 3. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 202453

 4. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah55

 5. SOP Pengumpulan Data Kinerja Berkala62

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika12

Tabel. 2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan Diskominfo Kabupaten Mojokerto 2021 – 202614

Tabel 2.3. Sasaran dan Indikator Sasaran Diskominfo Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 202615

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto Tahun 202417

Tabel 3.1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 202419

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 202422

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....28

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Nasional dan Daerah Sekitar30

Tabel. 3.5 Realisasi Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024.....22

Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan36

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Diskominfo Tahun 202437

Tabel 3.8 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....38

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Diskominfo Tahun 202439

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan *good governance dan clean governance*, diperlukan langkah strategis dengan memformulasikan sebuah kebijakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan valid sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKjIP Diskominfo Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Diskominfo

yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026, khususnya Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Disamping itu penyusunan LKJIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

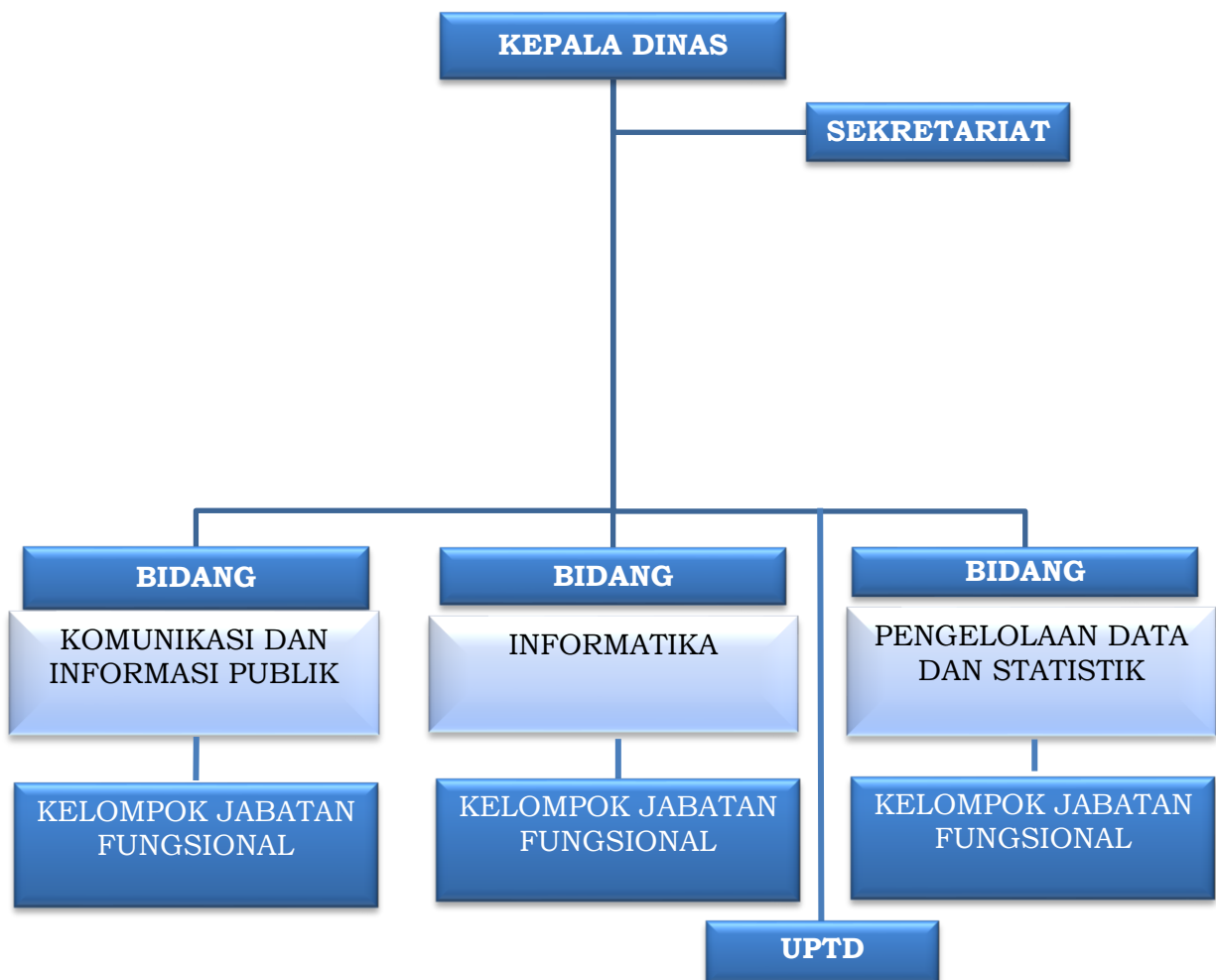
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ketentuan selanjutnya tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur unsur pelaksana Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut;

- Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto



Sumber data: Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

C. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Permen-PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024; dan
3. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2024tentang Penetapan

- Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024;
 13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

E. Aspek – Aspek Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya percepatan pelaksanaan transformasi digital di daerah, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu :

- a. Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik;
- c. Penyusunan strategi komunikasi publik;
- d. Penyusunan konten;
- e. Diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Pelayanan informasi publik;
- g. Relasi media;
- h. Kemitraan komunikasi dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- i. Penguatan kapasitas SDM komunikasi publik;

- j. Dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi;
- k. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
- l. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah.

F. Isu – Isu Strategis/ Permasalahan Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Belum optimalnya tata kelola, infrastruktur dan sistem informasi;
- b. Belum optimalnya keamanan teknologi informasi;
- c. Belum optimalnya penyediaan data statistik sectoral yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia;
- d. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
- e. Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik;

G. Sistematika

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah system pelaporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Analisa capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2024
3. Perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode Renstra
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional dan daerah lain

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan sebagai berikut :

1. Alokasi per sasaran pembangunan
2. Pencapaian kinerja dan anggaran tahun anggaran 2024
3. Efisiensi penggunaan sumber daya

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfo Tahun 2021-2026
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Diskominfo Tahun 2024
3. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Renstra Diskominfo merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** Adapun Misi Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : ***“Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan”***

Misi ini bertujuan mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, daya beli, pembangunan gender, kesalehan dan kerukunan umat beragama.

Misi 2 : “Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan sumber-sumber kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi; peningkatan PAD, investasi, laba BUMD; pertumbuhan Koperasi dan UMKM; kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya misi ini juga bertujuan untuk percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan nilai tukar petani, membangun desa, menurunkan penduduk miskin, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan.

Misi 3 : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.”

Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui reformasi birokrasi, ASN yang profesional dan berintegritas, pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan keuangan yang berkualitas, dan pemerintahan berlandaskan IT. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean governance dalam mendukung implementasi kota cerdas sampai pada lini desa.

Misi 4 : “Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Adapun sasaran meliputi pembenahan lokasi kumuh, penghijauan, keselamatan transportasi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalkan resiko bencana. Kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, termasuk didalamnya upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana. Dengan demikian diharapkan misi ini dapat tercapai.

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021- 2026 tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan disusun dengan mengacu visi dan misi Bupati serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 4 (empat) urusan, yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian, urusan Statistik, serta urusan Komunikasi dan Informasi Publik, maka tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai RPJMD Kabupaten Mojopahit tahun 2021-2026 adalah : Tujuan ke 3 dari Misi ke 3.

Berdasarkan rujukan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan tujuan tersebut, selengkapnya sebagai berikut :

Tujuan & Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto:

1. Tujuan

Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2. Sasaran

Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dapat di lihat pada tabel

2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 Meningkatkan pengembangan sistem informasi dengan ditunjang sarana dan prasarana IT yang memadai	1 Pengembangan Sistem Informasi melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana IT
		2 Meningkatkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		3 Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	3 Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi, pelayanan hubungan media dan masyarakat
		4 Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Kab.Mojokerto	4 Pengoptimalan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang valid, akurat dan akuntabel

Sumber data: Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran I LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Tabel. 2.2.
Tujuan dan Indikator Tujuan Diskominfo Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026

No	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	INDEKS SPBE = $\sum_{j=1}^n NDj \times BDj$ Keterangan : - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j- - BDj = Bobot Domain ke-j	2,71	2,6	2,7	3,75	3,85	4

Sumber data: Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Tabel 2.3.
Sasaran dan Indikator Sasaran Diskominfo Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	$\text{INDEKS SPBE} = \sum_{j=1}^n \text{NDj} \times \text{BDj}$ Keterangan : - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j- - BDj = Bobot Domain ke-j	2,71	2,6	2,7	3,75	3,85	4

Sumber data: Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Tujuan/	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi / Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,75

Sumber data: Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

B. Perjanjian Kinerja tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) serta seluruh indikator sasaran perangkat daerah. Perjanjian kinerja pada Diskominfo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ada 3 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Eselon II yakni Perjanjian Kinerja Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto;
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian Kinerja Kepala Bidang dengan Kepala Diskominfo;
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional yakni Perjanjian Kinerja Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan dengan Sekretaris/Kepala Bidang.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto
Tahun 2024

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,75
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,45%
	Indeks Profesionalitas ASN	90 (Tinggi)
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	19 Inovasi

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.531.065.000
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 4.410.744.500
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 7.219.227.000
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 50.000.000
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 200.000.000
	Total	Rp. 16.411.036.500

Adapun Rencana Kerja Tahunan Diskominfo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran II LKjIP Diskominfo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Sedangkan perjanjian kinerja Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran III LKjIP 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Diskominfo Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK). Dalam pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran

Pengukuran kinerja Diskominfo Kabupaten Mojokerto tahun 2024 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2023, realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022), serta realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standar penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

91% s.d.≤ 100%		Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%		Tinggi
66% s.d.≤ 75%		Sedang
51% s.d.≤ 65%		Rendah
≤ 50%		Sangat rendah

1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten Mojokerto, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori
1	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,75	4,16	110,93%	Sangat Berhasil

Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE oleh Kemenpan-RB

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis : “Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tahun 2024 terealisasi sebesar 4,16 dan tingkat capaian sebesar 110,93% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Perhitungan Indeks sebesar 4,16 diperoleh dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Walaupun sudah melampaui target kinerja, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Kurang optimalnya tata kelola teknologi informasi;
- ✓ Kurang optimalnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
- ✓ Kurang optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- ✓ Rentannya keamanan informasi;
- ✓ Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik; dan
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik.

Rencana tindak lanjut :

- ✓ Mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi untuk mewujudkan Smart City di Kabupaten Mojokerto;
- ✓ Membangun basis data yang terpadu dan up-to-date melalui Satu Data Palapa yang mendukung perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data (Data Driven Decision Making) di Kabupaten Mojokerto;
- ✓ Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja Diskominfo tahun 2024 mengacu pada Renstra Diskominfo Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja Diskominfo tahun 2021 s.d. tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika.	IKM Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika	95%	96,49%	101,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya penyelenggaraan SPBE dalam administrasi pemerintahan dan layanan publik/	Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik.	-	-	-	81%	103%	127,16%	100%	100,96%	100,96%	-	-	-
3	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,60	2,71	104,23%	2,60	2,73	105%	2,70	3,52	130,37%	3,75	4,16	110,93%
4	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 (BB)	80,40 (A)	105,79%	80,92 (A)	85,51 (A)	105,67%	85,6 (A)	85,20 (A)	99,53%	86 (A)	85,20 (A)	99,06%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	91,37%	101,52%	90%	84,14%	93,48%	92%	96,71%	105,12%	95,45%	96,23%	100,81%

		Indeks Profesionalitas ASN	76	82,90	109.08%	80	81,61	102,01%	89,9	89,81	99,90%	90 (Tinggi)	84,24	93,6%
5	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	-	-	2 inovasi	9 inovasi	450%	14 inovasi	16 inovasi	114,29%	19 Inovasi	19 Inovasi	100%

Sumber data: Dokumen E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto

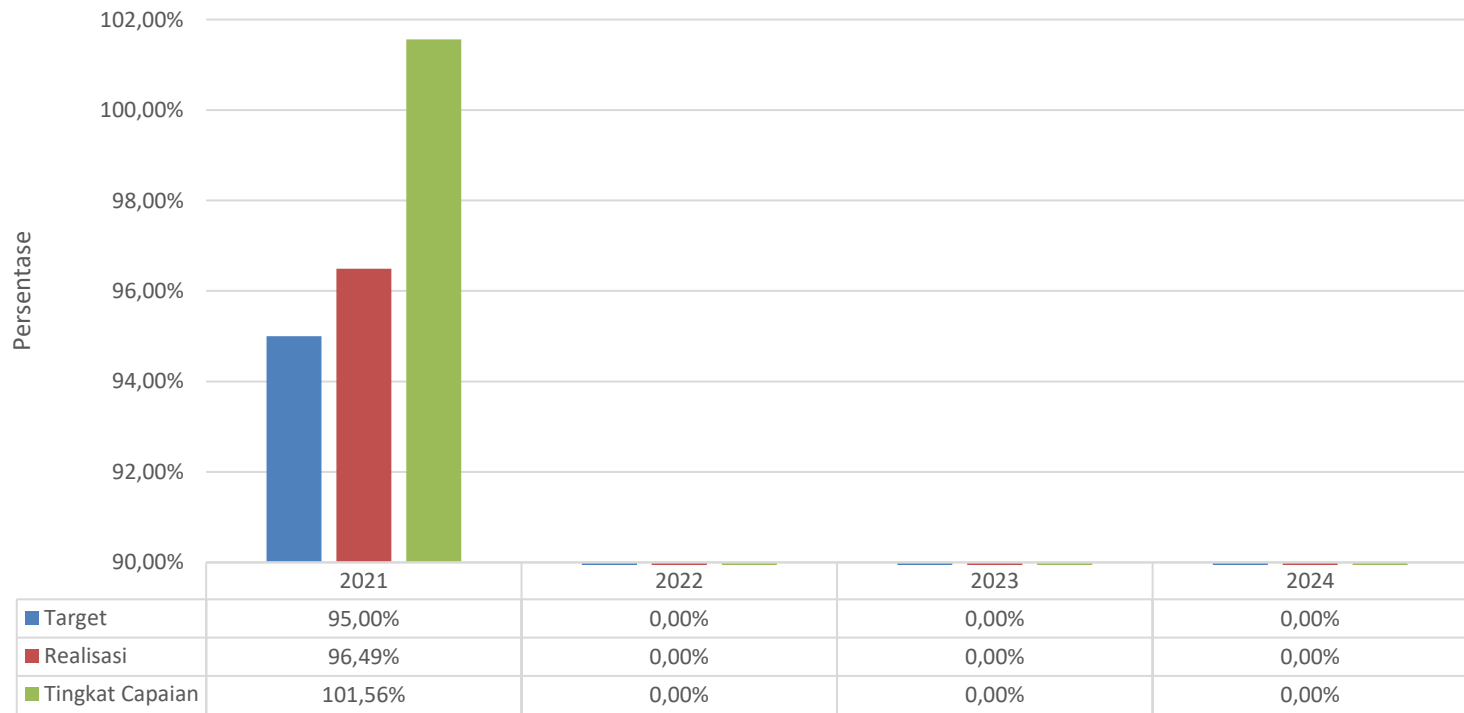
Keterangan :

 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang digunakan pada Tahun 2021.

 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang digunakan pada Tahun 2022 – 2023.

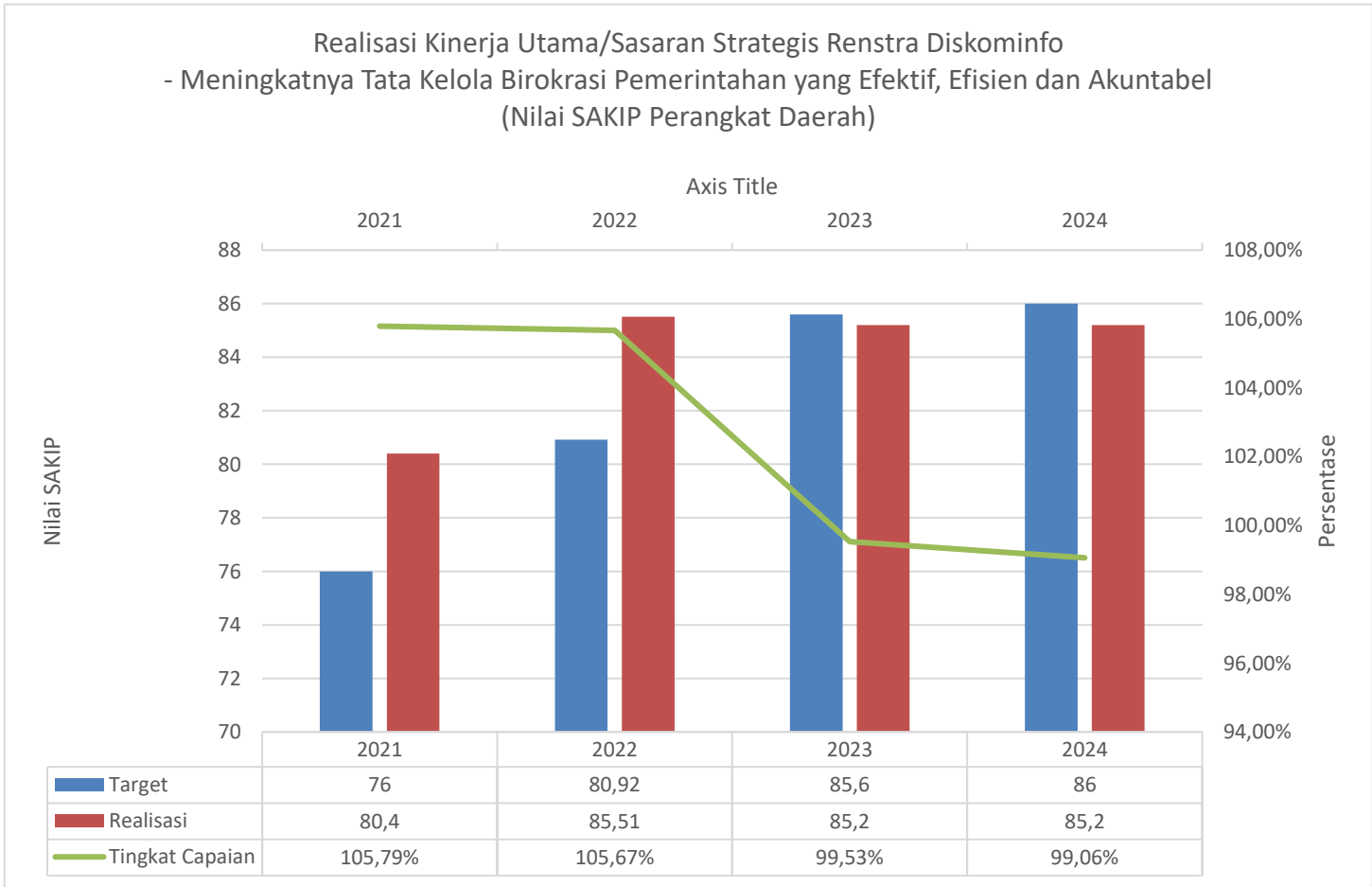
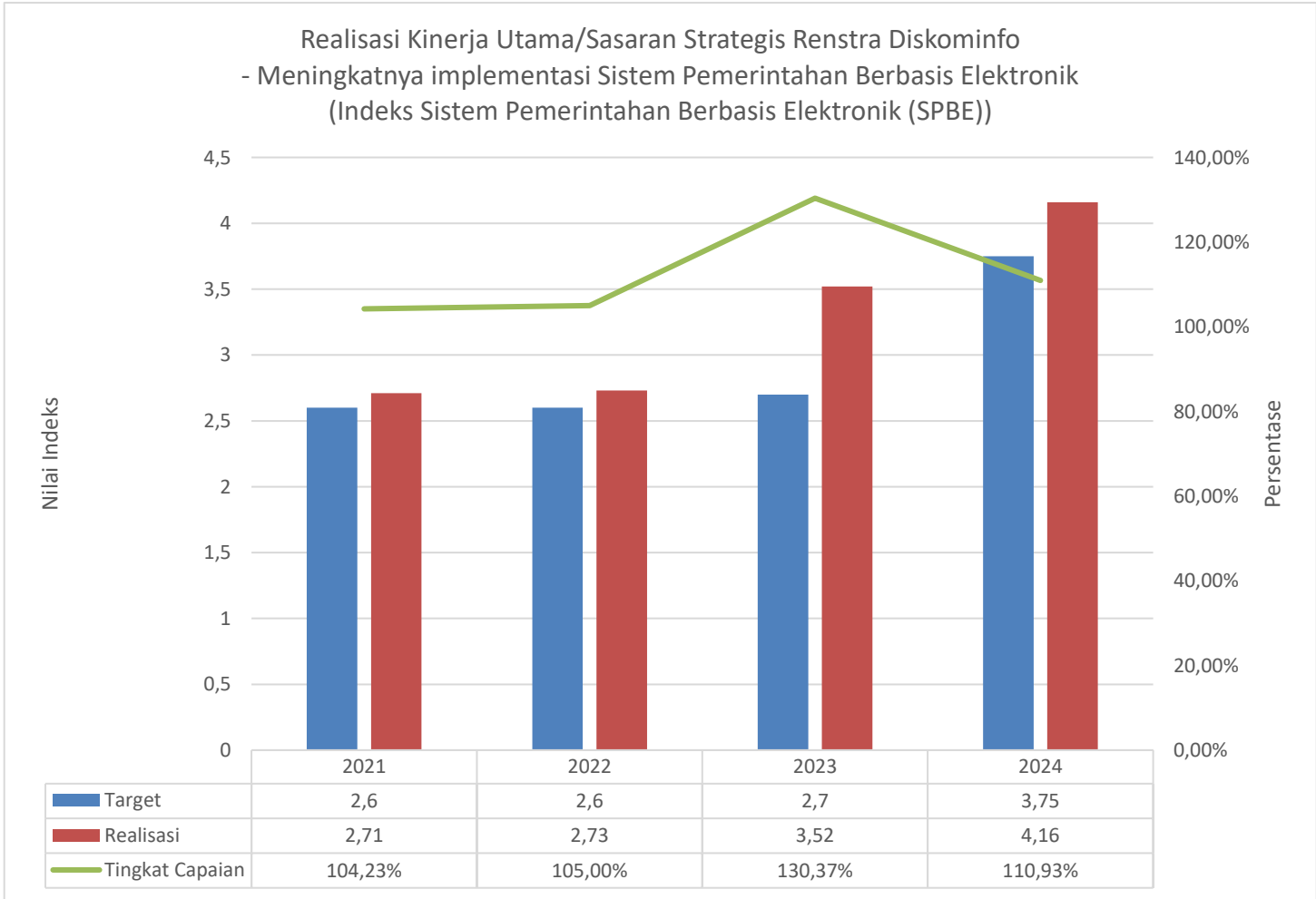
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang digunakan pada Tahun 2024.

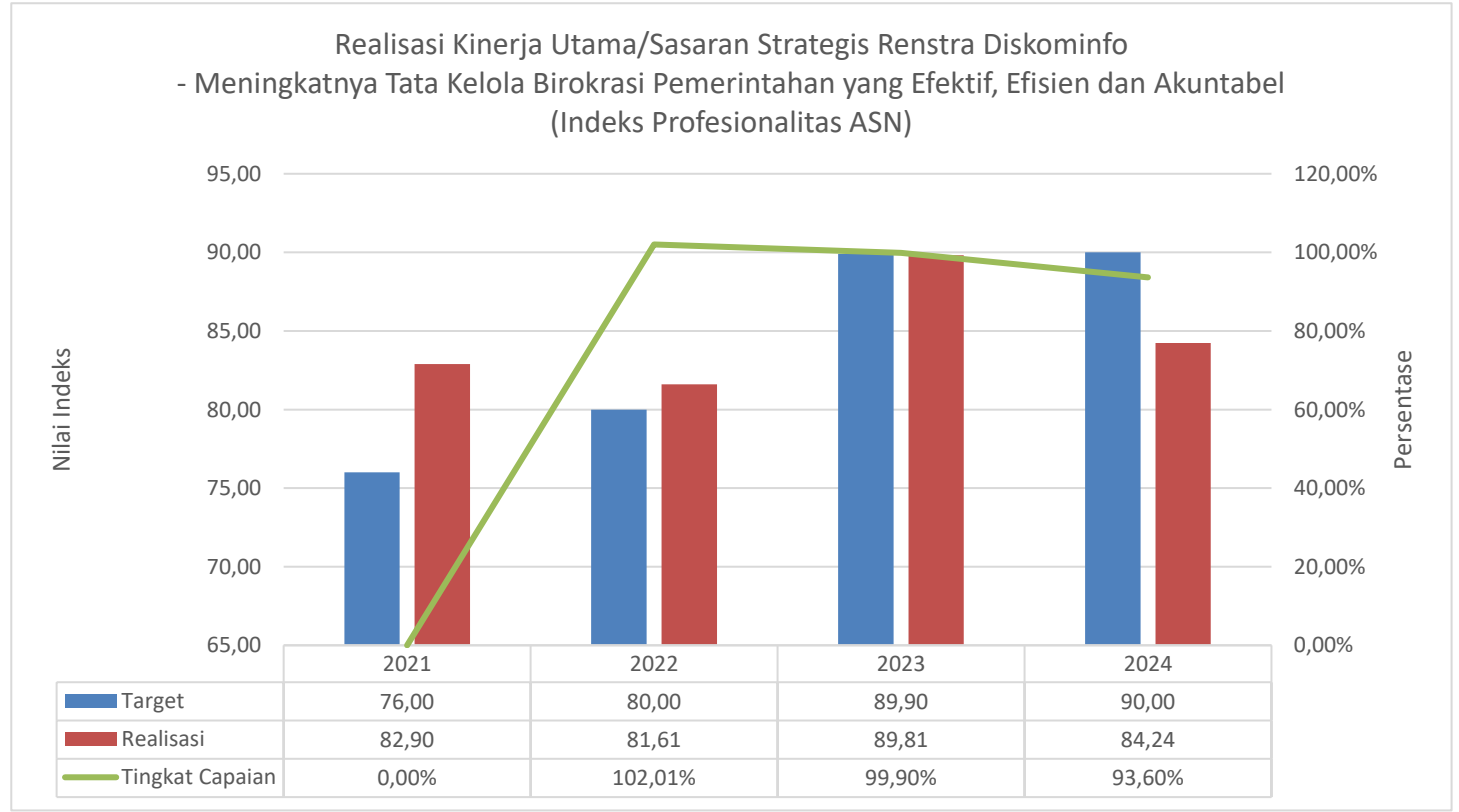
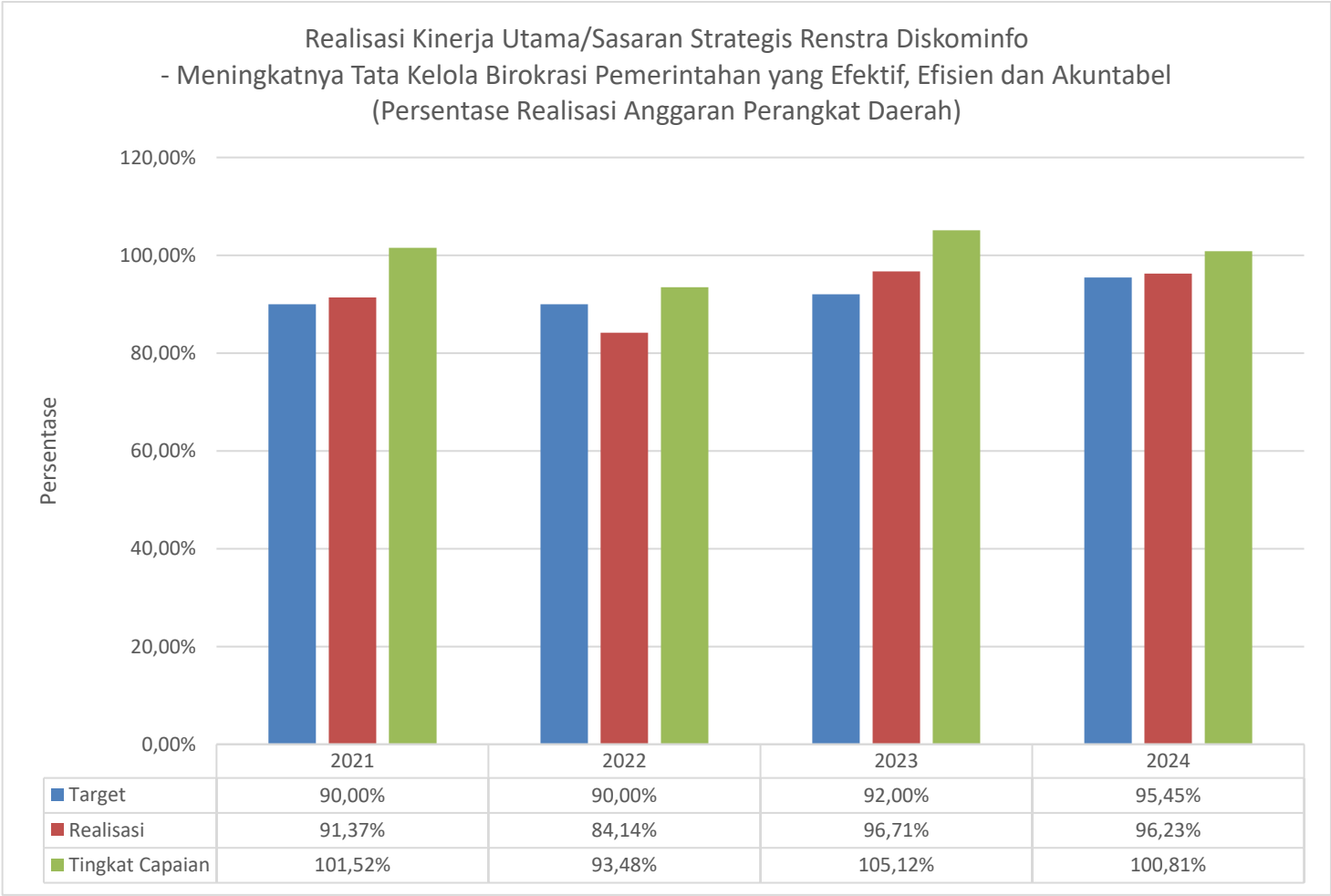
Realisasi Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra Diskominfo
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika.
(IKM Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika)



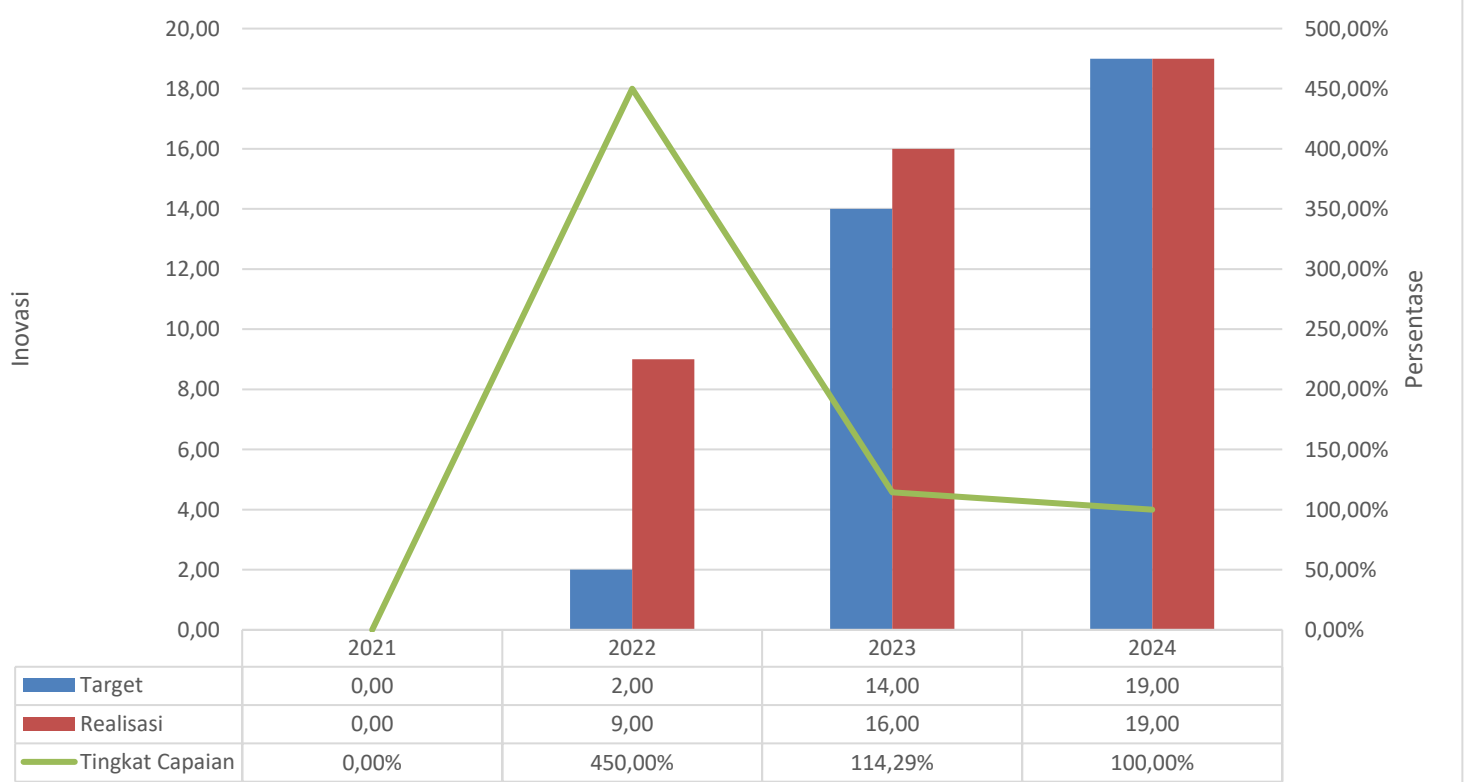
Realisasi Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra Diskominfo
- Meningkatnya penyelenggaraan SPBE dalam administrasi pemerintahan dan layanan publik.
(Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik.)







Realisasi Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra Diskominfo
- Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah
(Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan)



3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra)
1	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4	4,16	104%
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,5 (A)	85,20	98,49%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,80%	96,25	100,47%
		Indeks Profesionalitas ASN	92	84,24	91,56%
3	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	21	19	90,47%

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra tahun 2021 - 2026 maka ada beberapa indikator sasaran yang telah mencapai atau melampaui target akhir renstra yakni :

- a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 4,16 yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Diskominfo Tahun 2021- 2026; dan

- b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 96,25% yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026.

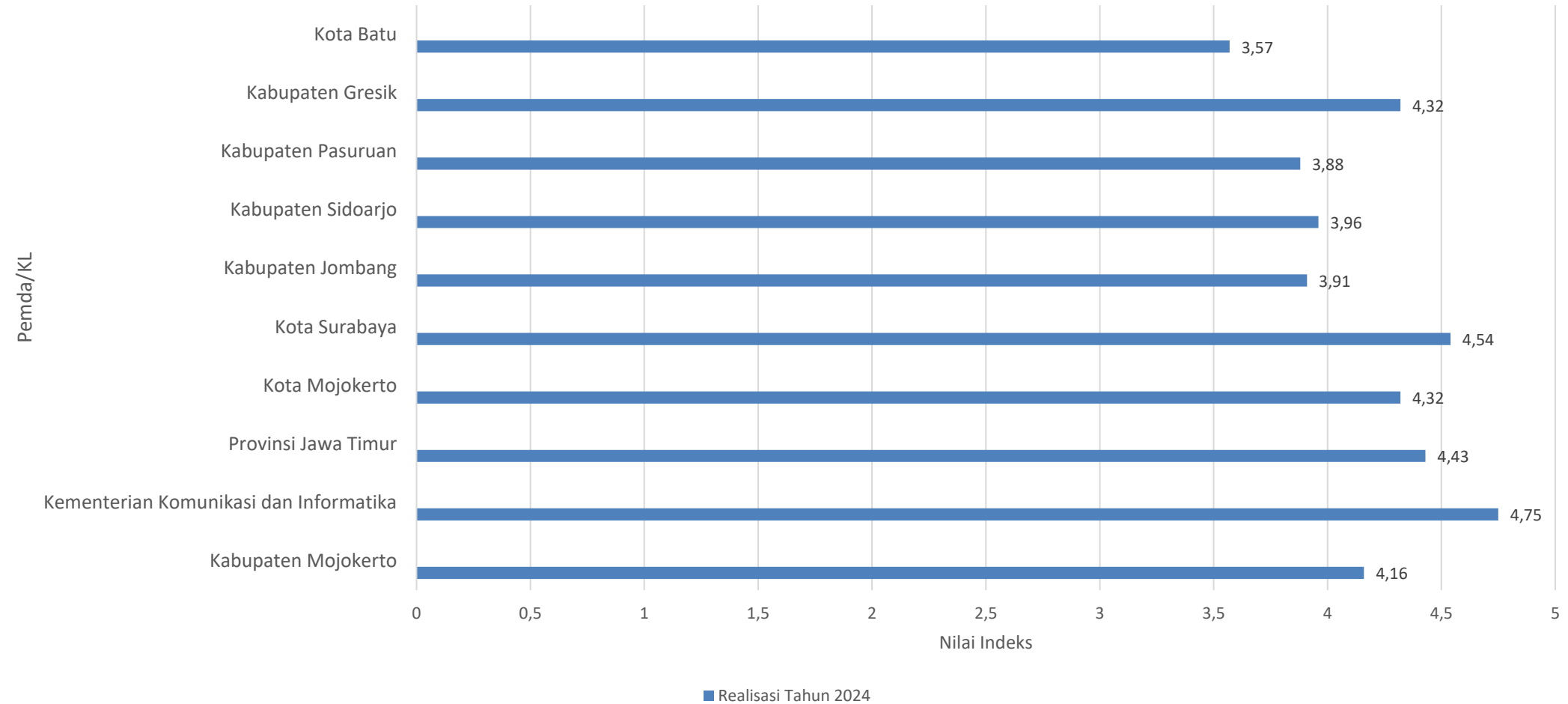
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional dan Daerah Lain

Untuk mengukur realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dibandingkan nasional dan daerah sekitar, maka dilakukan perbandingan realisasi indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Mojokerto dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Diskominfo Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kota Batu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Nasional dan Daerah Sekitar

No	Pemda/KL	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Keterangan
1	Kabupaten Mojokerto	Indeks SPBE	4,16	Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024, realisasi Indeks SPBE Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 mencapai nilai 4,16 dengan predikat Sangat Baik. Realisasi pada Tahun 2024 ini telah melampaui target akhir periode Renstra Diskominfo Tahun 2021- 2026.
2	Kementerian Komunikasi dan Informatika		4,75	
3	Provinsi Jawa Timur		4,43	
4	Kota Mojokerto		4,32	
5	Kota Surabaya		4,54	
6	Kabupaten Jombang		3,91	
7	Kabupaten Sidoarjo		3,96	
8	Kabupaten Pasuruan		3,88	
9	Kabupaten Gresik		4,32	
10	Kota Batu		3,57	

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Nasional dan Daerah Sekitar



B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Diskominfo, maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 19.133.884.991,00 (*Sembilan belas miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja operasi sebesar Rp 18.915.075.391,00; dan
- 2. Belanja modal sebesar Rp 218.809.600,00

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 3.5
Realisasi Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Mojokerto
Tahun Anggaran 2024

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.133.884.991	18.416.966.117	96,25%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.706.741.900	4.080.018.663	86,68%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.900.000	99,17%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	5.950.000	99,17%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.950.000	99,17%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.303.507.000	3.743.038.658	86,98%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.303.507.000	3.743.038.658	86,98%

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.600.000	81.487.214	84,36%
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.600.000	16.705.000	94,91%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	15.300.370	76,50%
3	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	20.760.750	83,04%
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	905.000	22,63%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	29.877.116	99,59%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.000.000	111.336.122	78,41%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	69.336.122	69,34%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000	42.000.000	100,00%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.634.900	132.256.669	86,65%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000	71.720.220	84,38%

2	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.034.900	44.181.500	95,97%
3	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.600.000	19.194.949	88,87%
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.894.237.591	6.826.128.330	99,01%
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	6.894.237.591	6.826.128.330	99,01%
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	985.538.000	969.642.740	98,39%
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.171.369.191	1.140.113.040	97,33%
3	Pelayanan Informasi Publik	490.383.800	485.835.670	99,07%
4	Layanan Hubungan Media	4.246.946.600	4.230.536.880	99,61%
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	7.284.905.500	7.263.616.680	99,71%
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	6.293.827.000	6.285.552.840	99,87%
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.293.827.000	6.285.552.840	99,87%
2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	991.078.500	978.063.840	98,69%
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	115.678.500	113.163.840	97,83%

2	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	875.400.000	864.900.000	98,80%
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	200.000.000	195.486.344	97,74%
1	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</i>	200.000.000	195.486.344	97,74%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	200.000.000	195.486.344	97,74%
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	48.000.000	46.815.078	97,53%
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	48.000.000	46.815.078	97,53%
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	48.000.000	46.815.078	97,53%

Sumber data: E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Mojokerto Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran Diskominfo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebesar **96,25%** dengan realisasi sebesar Rp 18.416.966.117,00 meliputi realisasi belanja operasi sebesar Rp 18.202.763.277,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp 214.202.840,00. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran Diskominfo tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan di atas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis Diskominfo sebagai berikut:

Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	%
1	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	19.133.884.991	100%
	Jumlah			100%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Diskominfo Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Diskominfo Tahun 2024

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,75	4,16	110,93%	19.133.884.991	18.416.966.117	96,25%
	Jumlah					19.133.884.991	18.416.966.117	96,25%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja Diskominfo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	110,93%	96,25%	1,15	Efisien

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sasaran “Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” sebesar 1,15 atau Efisien, karena untuk mencapai kinerja sebesar 110,93% diperlukan capaian anggaran sebesar 96,25%.

C. Prestasi/Penghargaan

Penghargaan/peran aktif dalam meraih penghargaan yang diraih oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Pada bidang keterbukaan informasi publik, Diskominfo Kabupaten Mojokerto peraih predikat Menuju Informatif Peringkat Pertama se- Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian indikator sasaran RKT 2024 yang sesuai dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Mojopahit tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indikator Indeks SPBE capaian kinerja sebesar 110,93% dan capaian anggaran sebesar 96,25%, atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

B. Langkah Perbaikan

Langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil Diskominfo untuk meningkatkan kinerja di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Diskominfo Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi untuk mewujudkan Smart City di Kabupaten Mojokerto	Diskominfo akan melaksanakan audit TIK pada seluruh Perangkat Daerah, melaksanakan sosialisasi Review Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE pada seluruh PD, serta menyusun dokumen Review Masterplan Smart City Kabupaten Mojokerto	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Sub kegiatan : (1) Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda. (2) Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE. (3) Koordinasi dan Fasilitasi	√	√	√

			Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			
2	Membangun basis data yang terpadu dan up-to-date melalui Satu Data Palapa untuk mendukung perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data (Data Driven Decision Making) di Kabupaten Mojokerto	Secara berkala Diskominfo akan melaksanakan desk dan monitoring keterisian data statistik sektoral seluruh Perangkat Daerah pada portal Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto. Selain itu bersama dengan Bappeda, BPS dan BPKAD, Diskominfo membina seluruh Perangkat Daerah selaku produsen data Kabupaten Mojokerto.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan : (1) Peningkatan Kualitas Data Statistis Sektoral. (2) Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional			√
3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam implementasi keterbukaan informasi publik	Diskominfo akan melaksanakan kerja sama dengan media, menyelenggarakan sosialisasi kepada perusahaan media terkait cukai, pengelolaan media komunikasi publik Pemkab Mojokerto seperti radio, medsos dan website, evaluasi pelaksanaan kanal pengaduan masyarakat DamarMojo	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan : (1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik. (2) Relasi Media. (3) Pelayanan Informasi Publik. (4) Monitoring Informasi	√	√	√

		dan PPID bersama seluruh Perangkat Daerah, serta pengelolaan call centre 112 Kabupaten Mojokerto	Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik			
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto



Drs. NUGRAHA BUDHI SULISTYA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 198903 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Matrik Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan Diskominfo Tahun 2024

MATRIK RENCANA STRATEGIS DISKOMINFO
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 – 2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

MISI : Ke 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2024	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	INDEKS SPBE = $\sum_{j=1}^n NDj \times BDj$ Keterangan : - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j- - BDj = Bobot Domain ke-j	-	3,75	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	INDEKS SPBE = $\sum_{j=1}^n NDj \times BDj$ Keterangan : - NDj = Nilai Indeks Domain ke-j- - BDj = Bobot Domain ke-j	-	3,75	Meningkatkan pengembangan sistem informasi dengan ditunjang sarana dan prasarana IT yang memadai	Pengembangan Sistem Informasi melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana IT	
										Meningkatkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	

											Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pengembang an konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarlua san informasi, pelayanan hubungan media dan masyarakat	
											Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Kab.Mojokerto	Pengoptimala n Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang valid, akurat dan akuntabel	

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 Diskominfo Kabupaten Mojokerto

Tujuan			Sasaran Strategis			Program				Kegiatan				Sub kegiatan			
Uraian			Uraian			Uraian				Uraian				Uraian			
Indikator	Uraian	Target	Indikator	Uraian	Target	Indikator	Uraian	Target 2024		Indikator	Uraian	Target 2024		Indikator	Uraian	Target 2024	
								Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran
Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,75	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Perangkat Daerah	95,45%	4.706.741.900								
							Indeks Profesionalitas ASN	90									
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)									
							Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan	19									

							Tersosialisasi serta berkelanjutan											
										Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	100%	12.000.000					
														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000
														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000
										Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan	100%	4.303.507.000					

										Perangkat Daerah	n Kebutuahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
														Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/14 Bulan	4.303.507.000
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuahan	100%	96.600.000				
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	17.600.000
														Penyediaan	Jumlah	1 Paket	20.000.000

														n Barang Cetakan dan Pengganda an	Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n		
														Penyediaa n Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Ma terial yang Disediaka n	1 Paket	25.000.000
														Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Paket	4.000.000
														Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	30.000.000
														Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentas e Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta	100%	142.000.00 0

										han Daerah Yang Dilaksanak an Sesuai Ketentuan							
														Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	12 Laporan	100.000.00 0
														Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12 Laporan	42.000.000
										Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta	Persentas e Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100,00%	152.634.90 0				

										han Daerah							
														Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan Perizinann ya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan	14 Unit	85.000.000
														Pemelihar aan / Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi	3 Unit	46.034.900
														Pemelihar aan / Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	50 Unit	21.600.000

														atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi		
						PROGRAM INFORMAS I DAN KOMUNIK ASI PUBLIK	Indeks Keterbuka an Informasi Publik	71	6.894.237. 591								
										Pengelola an Informasi dan Komunika si Publik Pemerinta h Daerah Kabupate n / Kota	Persentas e diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanak an sesuai dengan strategi komunikas i (STARKO M) dan SOP yang telah ditetapkan	87%	6.894.237.5 91				
														Monitorin g Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitorin g Opini dan	13 Dokume n	985.538.00 0

															Aspirasi Publik		
														Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	15 Dokumen	1.171.369.191
														Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	490.383.800
														Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	95 Layanan	4.246.946.600
						PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	3,7	7.284.905.500								
										Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	Persentase OPD Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediaka	100%	6.293.827.000				

										Domain di Lingkup Pemerinta h Daerah Kabupate n / Kota	n Oleh Diskominf o						
														Penyeleng garaan Sistem Jaringan Intra Pemerinta h Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerinta h Daerah	99 Unit	6.293.827. 000
										Pengelola an e- governme nt di Lingkup Pemerinta h Daerah Kabupate n / Kota	Tingkat kematang an aspek teknologi informasi pada domain tata kelola SPBE	3,6	991.078.50 0				
														Penatalaks anaan dan Pengawas an e- governme nt dalam Penyeleng garaan Pemerinta han Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaks anaan dan Pengawas an E- Governme nt dalam Penyeleng garaan Pemerinta han	2 Dokume n	115.678.50 0

															Daerah		
														Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	875.400.00
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,9	200.000.000								
										Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	1. Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.	100%	200.000.000				

											2. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan	68,42%					
											3. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	100%					
											4. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam	100%					

										pelaksana an monitorin g dan evaluasi pembangu nan daerah.							
													Koordinasi dan Sinkronisa si Pengumpu lan, Pengolaha n, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisa si Pengumpu lan, Pengolaha n, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	18 Dokume n	200.000.00 0	
						PROGRAM PENYELEN GGARAAN PERSANDI AN UNTUK PENGAMA NAN INFORMAS	Indeks KAMI	300	48.000.00 0								
										Penyeleng garaan Persandia	Persentas e Layanan Elektronik	78%	48.000.000				

										n untuk Pengaman an Informasi Pemerinta n Daerah Kabupate n / Kota	yang Diamanka n						
														Pelaksanaa n Keamanan Informasi Pemerinta han Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksana an Keamanan Informasi Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	48.000.000

3. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Jabatan : PIt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
PIt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197009271991011002

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,75

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,45%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	90 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	19 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.706.741.900	P APBD 2024
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 6.894.237.591	P APBD 2024
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 7.284.905.500	P APBD 2024
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 48.000.000	P APBD 2024
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 200.000.000	P APBD 2024

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197009271991011002

4. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

PERANGKAT DAERAH : DISKOMINFO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	$\text{INDEKS SPBE} = \sum_{j=1}^n \text{NDj} \times \text{BDj}$ Keterangan : NDj = Nilai Indeks Domain ke-j- BDj = Bobot Domain ke-j	3,75	4,16	110,93		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.706.741.900	Rp. 4.084.919.685	86,79%	
								Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 6.894.237.591	Rp. 6.826.128.330	99,01%	
								Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 7.284.905.500	Rp. 7.263.616.680	99,71%	
								Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 200.000.000	Rp. 195.486.344	97,74%	

								Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 48.000.000	Rp. 46.815.078	97,53%	
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Formulasi penghitungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	86	85,20	99,06						
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Total Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Dibagi Total Pagu Anggaran Perangkat Daerah dikali 100 persen	95,45%	96,25%	100,83						
		Indeks Profesionalitas ASN	Formulasi Penghitungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2018 tentang Indeks	90 (Tinggi)	84,24 (Tinggi)	93,60						

			Prefesionalitas ASN									
3	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	19	19	100,00						

5. SOP Pengumpulan Data Kinerja Berkala

 KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NOMOR SOP	: 401/SOP/416-113/2021
	TGL. PEMBUATAN	: Mei 2021
	TGL. REVISI	: Mei 2021
	TGL. EFEKTIF	: Mei 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto  DISTAR SEPDIANTO. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700927 199101 1 002
NAMA SOP		SOP Pengumpulan Data Kinerja Berkala
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 3. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 (Keuangan Negara) 4. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara) 5. Undang Undang No. 15 Tahun 2003 (Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab KN) 6. Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 7. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 9. Perpres 29/2014 Tentang SAKIP 10. Permen PANRB No. 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1. Memahami Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Berkala 2. Menguasai Pengoperasian Komputer 3. Memahami Tentang Penyusunan Laporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja
KETERIKATAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penilaian Kinerja 2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)		1. Perangkat komputer 2. Peralatan Alat Tulis 3. Lemari Arsip 4. Berkas Target Dan Realisasi Kinerja Bulanan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila di masa yang akan datang SOP ini sudah sesuai dengan prosedur, maka SOP ini akan di revisi ulang		

FLOW CHART PENGUMPULAN DATA KINERJA BERKALA

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang Dan Kepala Seksi	Kasubag Penyusunan Program Dan Keuangan	Analisis Perencanaan	Admin Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Memerintahkan untuk mengumpulkan data kinerja berkala							Lembar disposisi	120 Menit	Lembar disposisi	
2	Memberikan disposisi dan arahan untuk pengumpulan data kinerja secara berkala							Disposisi	60 Menit	Disposisi	
3	Membuat Konsep dan mengolah Form Data Kinerja							Draft Form Data Kinerja	300 Menit	Draft Form Data Kinerja	
4	Mempersiapkan form isian data kinerja untuk masing masing bidang (Editing Konsep Data Kinerja)							Dokumen Draft Form Data Kinerja	300 Menit	Draft 1	
5	Memeriksa konsep draft dokumen form isian data kinerja		Tidak					Draft 1	300 Menit	Draft 2	
6	Mengoreksi dan memaraf draft dokumen form isian data kinerja	Tidak						Draft 2	300 Menit	Draft 3	
7	Memeriksa dan menandatangani konsep dokumen form isian data kinerja dan memerintahkan sekretaris untuk mendistribusikannya							Draft 3	30 Menit	Final Draft	
											Berlanjut ke halaman brikut

8	Menerima perintah dan meneruskan dokumen dimaksud ke Kasubag Penyusunan Program Dan Keuangan							Final Draft	60 Menit	Final Draft	
9	Menerima dan mempelajari perintah serta menyampaikannya kepada analis perencanaan							Final Draft	300 Menit	Form isian data kinerja berkala	
10	Menerima dan mendistribusikan form data kinerja ke bidang - bidang							Form isian data kinerja berkala	120 Menit	Form isian data kinerja berkala sesuai target kinerja	
11	Melaksanakan Rapat Intern bidang dan mendistribusikan form data ke Kasi-kasi							Form isian data kinerja berkala sesuai target kinerja	900 Menit	Isian Data kinerja berkala sesuai target kinerja	
12	Menginventarisasi data kinerja dari bidang bidang sesuai waktu yang telah ditentukan							Data kinerja berkala sesuai target kinerja	300 Menit	Pengumpulan Data kinerja berkala	
13	Menganalisis Data kinerja serta menyampaikannya ke Admin Perencanaan							Data Kinerja Berkala	120 Menit	Data Kinerja Berkala yang sudah teranalisis	
14	Menerima dan memverifikasi data kinerja							Data Kinerja Berkala yang teranalisis	120 Menit	Data Kinerja Berkala yang sudah teranalisis dan terverifikasi	
15	Memberi Paraf data kinerja berkala							Data Kinerja Berkala teranalisis dan terverifikasi	10 Menit	Data Kinerja Berkala terparaf	
16	Menandatangani data kinerja berkala							Data Kinerja Berkala terparaf	10 Menit	Data Kinerja Berkala yang tertandatangani	
17	Mengarsipkan dan Menyerahkan Laporan Data Kinerja Ke Bappeda							Laporan yang telah di tandatangani	60 Menit	Tanda Terima Arsip	